PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RETNO DEWI BANOWATI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
3. NHK : **1000444**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 5.902.000.000

1. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 1.036 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.554.000.000
3. Tanah Seluas 868 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.736.000.000
4. Tanah Seluas 481 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 962.000.000
5. Tanah Seluas 165 m2 di KAB / KOTA ASAHAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 562.500.000

1. MOTOR, HONDA X1H02N3L1 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
2. MOTOR, ZUNDAP SUPER COMBINETTE SEPEDA KUMBANG Tahun 1966, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOTOR, BMW R26 Tahun 1957, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
4. MOTOR, DKW SEPEDA KUMBANG Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. MOTOR, HONDA C50 Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000
6. MOTOR, VESPA PTS Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp.

35.000.000

7. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
8. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**----**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**9.259.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**6.473.759.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**6.473.759.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.